



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DODI HENDRA SUPIARSO  
2. Jabatan : ANGGOTA  
3. NHK : 522845

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.400.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/140 m2 di KAB / KOTA REJANG LEBONG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/100 m2 di KAB / KOTA REJANG LEBONG, WARISAN Rp. 800.000.000		
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA REJANG LEBONG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>207.000.000</b>
1. MOTOR, GL PRO - Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>104.689.689</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
Sub Total	<b>Rp.</b>	<b>1.711.689.689</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>394.947.452</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.316.742.237</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkn.kpk.go.id](http://elhkn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.